



PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Conditional Criminal Imposing to Perpetrators of Criminal Acts of Persecution

Adia Nugraha

Bank Mandiri Lampung

email: nugrahaadia@yahoo.com

Abstract

Basic considerations of criminal law judges in imposing conditional on the perpetrators of criminal acts of persecution are juridical considerations, namely the fulfillment of a minimum of two items of evidence in the trial, the judge considered that there are justification, an excuse and a reason for removing the judge the prosecution to convict on parole. Beside the judges also look at the background of the events of the crime as a whole as well as the attitudes and actions of the defendant in the community daily. The defendant did cause by the maltreatment victims who are not acting in good faith to the defendant as a guarantor of loans receivable in the pawnshop and the defendant has been helping victims to get a loan. Court decisions that criminalize conditional against an abuser are deemed not in accordance with the justice community because judges are less sensitive to the suffering of victims of the crime of persecution by the defendant. The judge should impose a more optimal criminal defendant, given the criminal acts of persecution that resulted in physical harm to the victim in the form of bruises and abrasions due to blunt impact.

Keywords: *Imposition, Conditional Punishment, Persecution*

Abstrak

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah pertimbangan yuridis sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP, hakim menilai bahwa terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim

dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Selain itu hakim juga melihat peristiwa yang melatar belakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan oleh korban yang tidak beritikad baik kepada terdakwa sebagai penjamin hutang piutang di Pegadaian dan terdakwa telah menolong korban untuk mendapatkan pinjaman. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dipandang belum sesuai dengan keadilan masyarakat karena hakim kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa. Hakim semestinya menjatuhkan pidana yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban berupa luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul.

Kata Kunci: *Penjatuhan Pidana, Hukuman Bersyarat, Penganiayaan*

A. Pendahuluan

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.¹

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan semakin fenomena

¹ Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 3.

kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²

Salah satu jenis tindak pidana umum yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.³

Tindak pidana penganiayaan dalam Perkara Nomor: 55/Pid/2015/PT.TJK, dilakukan oleh Erlinda terhadap korban Septi Handayani, yang mengakibatkan luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul sebagaimana hasil visum Nomor: 1714/46/2014. Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu

² Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, p. 27.

³ Hamzah, Andi. *Op.Cit.*, p. 22.

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan kurungan, tetapi majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

Ketentuan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP sebagai berikut:

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban Septi Handayani Binti Iskandar Hamid sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 1714/46/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten tanggamus yang diperiksa oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil pemeriksaan tubuh, terdapat memar di kelopak mata kanan atas dan pipi kanan atas dengan Diameter \pm 5 Cm dan luka memar dan lecet

dileher bagian depan dengan diameter ± 5 Cm x 7 Cm. Hasil *Visum et Repertum* ini menyimpulkan bahwa luka memar dan lecet tersebut akibat benturan benda tumpul.

Penjatuhan pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, sebagaimana diputuskan hakim tersebut relatif kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa. Selain itu penganiayaan ini dilakukan terdakwa dihadapan anak korban yang masih kecil, bahkan perbuatan terdakwa berupa mendorong dan mencekik korban dilakukan ketika korban sedang menggendong anaknya yang menangis.

Sesuai dengan uraian di atas maka isu hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor: 55/Pid/2015/PT.TJK, adalah hakim mengabaikan aspek kerugian dan penderitaan fisik yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana penganiayaan. Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim juga tidak memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut. Seharusnya terdakwa dipidana penjara (kurungan badan) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.⁴

Putusan hakim mempertaruhkan citra hakim di mata masyarakat, sebab putusan yang tidak menimbulkan rasa keadilan akan memunculkan cemoohan terhadap hakim, meskipun dengan dalih berdasarkan bukti-bukti yang diajukan beserta keyakinannya hakim sudah maksimal memeriksa perkara yang bersangkutan. Hakim sering lupa dalam memeriksa suatu perkara, dianggapnya perkara tersebut adalah perkara-perkara yang sama saja satu dengan yang lain. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵

⁴ *Ibid*, p. 47.

⁵ Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 92.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Artinya dasar pertanggungjawaban pidana seseorang adalah kesalahan yang dilakukannya.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁶

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.⁷

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan

⁶ *Ibid*, p. 49.

⁷ *Loc. Cit.*

kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.⁸

Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang *pertama* apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan?; *kedua* apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan sudah sesuai dengan keadilan masyarakat?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

⁸ Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 155.

Terdakwa Erlinda Binti Zainal dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 55/Pid/2015/PT.TJK, terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban bernama Septi Handayani. Akibat dari perbuatan tersebut adalah korban mengalami penderitaan fisik, namun dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan pidana bersyarat pada terdakwa.

Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP).

b. Keterangan saksi. Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c. Keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP butir E keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

d. Barang-barang Bukti

Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

- e. Pasal-pasal yang didakwakan. Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Majelis hakim menimbang bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan kurungan, tetapi majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

Menurut Nelson Panjaitan⁹ hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Ketentuan mengenai pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana adalah kemajuan positif yang dicapai oleh

⁹ Hasil Wawancara dengan Nelson Panjaitan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kamis 19 November 2015

terpidana dan perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Menurut Firza Andriansyah¹⁰ pemidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Menurut Firza Andriansyah¹¹ sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana, dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan.
- c. Alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/kemanfaatan kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan.

Alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi (a) Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP, (b) Alasan-alasan yang di luar batin terdakwa, yaitu Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP dan (c) Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana. Beberapa

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Firza Andriansyah, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kamis 19 November 2015

¹¹ Hasil Wawancara dengan Firza Andriansyah, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kamis 19 November 2015

ketentuan tertentu yang mengakibatkan seseorang dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dengan adanya ketentuan penghapusan pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (2), Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (2).

Pertanggungjawaban pidana penganiayaan dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/lalai (*culpa*), di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain. Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan adalah sebagai berikut:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebuah dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi/sengaja bersyarat/*dolus evantualis*, adalah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat: (1) Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikan/lapisan masyarakat di mana terdakwa hidup (2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata timbul, dapat disetujui atau berani menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan. Seorang pelaku tindak pidana mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja melakukan

tindak pidana maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut di depan hukum.¹²

b. Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Pada intinya *culpa* mencakup (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah, dan ihwal *culpa* disini jelas merujuk kepada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. *Culpa* tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delik-delik omisi, tapi juga dalam delik-delik (komisi) biasa lainnya, kadang kala dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP, soal perbuatan tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan tercakup di dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik dengan tindakan, adalah bahwa keduanya menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal *culpa* untuk delik (komisi) biasa, kemampuan psikis seseorang tidak digunakan, padahal kemampuan tersebut seharusnya digunakan.

Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian/kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam pidana¹³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Erlinda Binti Zainal didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan tidak menimbulkan efek jera Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara itu harus dilihat peristiwanya secara keseluruhan yaitu peristiwa yang melatar

¹² Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, p. 46.

¹³ *Ibid*, p. 47.

belakangi perbuatan pidana tersebut, lalu sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat, apakah terdakwa orang yang baik atau memang orang yang tidak baik (jahat di dalam masyarakat)

- 2) Faktor yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Septi Handayani adalah karena saksi Septi Handayani tidak mau menyerahkan surat gadai emas milik Kartini kepada terdakwa sebagai penjamin utang, karena emas milik Kartini yang digadaikan ke penggadaian sudah diambil saksi korban Septi Handayani tanpa sepengetahuan terdakwa sebagai penjamin hutang, saksi korban dan emasnya pun tidak dikembalikan kepada Kartini
- 3) Pertimbangan lainnya adalah karena pada waktu terdakwa menanyakan surat gadai emas milik Kartini kepada saksi korban jawabannya pun tidak baik yaitu saksi korban menjawab tidak tahu dan mengatakan cari aja disimpang dan meminta kepada Fajar.
- 4) Terdakwa telah menolong saksi korban Septi Handayani untuk mendapatkan pinjaman dari Kartini bahkan menjadi penjaminnya
- 5) Terjadinya penganiayaan oleh terdakwa terhadap saksi korban itu juga disebabkan sikap dan itikat buruk saksi korban Septi Handayani tidak mengembalikan emas milik Kartini yang telah diambil oleh saksi korban tersebut sehingga tidak adil kalau terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan
- 6) Menimbang, bahwa pemidanaan itu tidak hanya untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi agar terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, sehingga dengan sadar tidak akan mengulangnya lagi
- 7) Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kelakuannya baik di dalam masyarakat, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, di mana Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan putusannya dengan benar
- 8) Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 99/Pid.B/2015/PN.Kot dan telah pula membaca memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding

- 9) Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 99/Pid.B/2015/PN.Kot yang dimintakan banding
- 10) Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dengan pidana percobaan maka oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari tahanan kota
- 11) Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan terhadap terdakwa Erlinda Binti Zainal, sebagai bentuk pemidanaan terhadapnya.

Pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat maka hal yang dipertimbangkan adalah pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dimasyarakat. Terpidana dalam pidana bersyarat dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Status pidana dapat digolongkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yang tidak mencantumkan pidana bersyarat baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi yang ditentukan, dirumuskan pada Pasal 14 a-f KUHP, merupakan suatu syarat pelaksanaan pidana penjara, kurungan bukan pengganti pidana denda.

Menurut Erna Dewi¹⁴ hakim dalam praktek peradilan pidana tidak sedikit yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat-syarat umum dan khusus. Praktek peradilan pidana semacam ini perlu mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum. Pembinaan terpidana di luar penjara atau pidana bersyarat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem kepenjaraan secara bertahap.

Perkembangan viktimologi telah mengalami kemajuan, dengan fokus pada korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pidana sebagai salah satu alternatif pidana penjara dan penerapan penology sebagai ilmu yang bernuansakan kemanusiaan, berguna untuk menghindari pengaruh negatif dari dari pelaksanaan pidana penjara bagi terpidana. Agar pidana bersyarat, masih terasa segi penderitaannya, maka terpidana dibebani bentuk lain sekaligus sebagai imbalan perhatian dan perlakuan kepada korban kejahatan untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan korban dapat diwujudkan sejumlah uang dari terpidana yang disebut retribusi.

Pidana bersyarat pada dasarnya merupakan usaha pembinaan terpidana di luar penjara, hakim dalam memutuskan perkara berpedoman pada sifat tindak pidana, Integrasi pidana bersyarat dengan restitusi merupakan imbalan kepada korban dan terpidana, sehingga menguntungkan terpidana dan korban atau keluarganya.

Menurut Erna Dewi¹⁵ penjatuhan pidana bersyarat dilakukan dengan hati-hati, sehingga ditentukan dalam Pasal 14 a-f KUHP, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan, jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat-syarat khusus, jika syarat-syarat itu ada.

Menurut Erna Dewi¹⁶ hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana. walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Sabtu 21 dan 23 November 2015.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Sabtu 21 dan 23 November 2015.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Sabtu 21 dan 23 November 2015.

Terpidana yang dibebaskan bersyarat itu harus diawasi, jika dikehendaki “supaya pembebasan bersyarat itu jangan sampai menjadi suatu pengampunan dengan diam-diam dari bagian pidana yang masih harus dijalani”. Terpidana juga mengerti, akan disertai tugas untuk mengawasi dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh terpidana yang bersangkutan. Terpidana merasakan, akan mengalami dua keberatan yaitu pertama hubungan kepercayaan yang akan diselenggarakan dengan terpidana yang dibebaskan, akan dibahayakan, karena dengan pelaksanaan dari pengawasan, terpidana yang dibebaskan akan menaruh curiga terhadap mereka, yang akan memberikan bantuan. Selain itu pelaksanaan dari pengawasan memakan ongkos yang banyak, yang memaksa himpunan dan perkumpulan lain yang membantu melakukan pengawasan meminta subsidi kepada negara, sehingga posisi dari himpunan terhadap pemerintah tidak bebas lagi.

Pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya, kecuali jika melanggar syarat umum atau khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan pada pelepasan bersyarat, terpidana harus atau telah menjalani pidananya paling kurang $\frac{2}{3}$ dari hukuman, Sehingga pelepasan bersyarat itu tidak otomatis, dapat dikatakan diberikan pelepasan bersyarat. Keputusan untuk diberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat penuntut umum dan oleh pejabat lembaga pemasyarakatan, yang mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya. Maksud pelepasan bersyarat adalah sama dengan pidana bersyarat, ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga yang berguna.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistim pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila menteri memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut pasal 15 a, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan. Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan, maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya, pelepasan pidana dapat dicabut kembali atas usul jaksa ditempat terpidana berdiam dengan pertimbangan dewan pusat reklasering. Menteri kehakiman, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya, selama

60 hari, jika waktu itu telah lewat dan belum keluar keputusan keputusan itu, maka terpidana harus dikeluarkan dari tahanan. Dalam praktek, pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh jaksa ditempat terpidan berdiam, dengan paraf buku pelepasan bersyarat yang ditunjukkan oleh terpidana pada waktu yang ditentukan secara berkala. Perdebatan mengenai pembedanaan dan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum pidana secara ideal terus-menerus mengalami penjelajahan untuk terus mencari ketajaman. Ketajaman tersebut baik secara politis, sosiologis, maupun filosofis, hingga bertujuan untuk mencapai landasan bagi penerapan sanksi dari berbagai alternatif pembedanaan yang lebih adil, untuk tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dalam perspektif Pancasila. Pemakaian Pancasila sebagai perspektif Indonesia dalam pembedanaan, bertolak dari asumsi, bahwa sila-sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik bagi manusia secara universal.

Tujuan pembedanaan masyarakat Indonesia yang integralistik dalam kelima sila dalam Pancasila adalah suatu keseimbangan lahir dan bathin dalam mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat Indonesia yang terbentang dalam nuansa masyarakat Indonesia yang bercirikan religius magis, demi keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya mencari falsafah pembedanaan adalah falsafah yang sudah digali dalam tubuh jiwa bangsa yaitu Pancasila. Perkembangan ide kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Berarti dilatarbelakangi oleh ide dasar Pancasila yang terkandung di dalamnya keseimbangan nilai moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Tujuan pembedanaan yang ideal adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Perkembangan mengenai pembedanaan melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Fungsi hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada. Sanksi denda dalam falsafah pembedanaan yang dapat diukur menurut rasa keadilan masyarakat Indonesia mendapat perhatian, karena pencarian alternatif pembedanaan lain selain

pidana kehilangan kemerdekaan lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut dengan kuat membentuk dan mewarnai proses pendidikan dan rasa keadilan di dalam masyarakat yang pada akhirnya gerakan perubahan dapat mempengaruhi usaha-usaha pembaharuan hukum pidana yang terus berlangsung untuk mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional berdasarkan falsafah yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memandang rasa yang tinggi melalui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pidana bersyarat oleh Majelis pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Rasa Keadilan Masyarakat

Majelis Hakim Tindak pidana penganiayaan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 55/Pid/2015/PT.TJK, memutus pidana bersyarat terhadap Erlinda Binti Zainal sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Pidana bersyarat ini tidak sesuai dengan keadilan masyarakat, karena perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian atau penderitaan fisik.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.¹⁷

Menurut Nelson Panjaitan¹⁸ ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dikenal dengan pola pembedaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, p. 155.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Nelson Panjaitan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kamis 19 November 2015

sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.

Menurut Firza Andriansyah¹⁹ tujuan pidana adalah prevensi atau pencegahan, sanksi pidana merupakan sanksi yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana adalah nyawa, badan (kebebasan), kehormatan dan harta benda manusia, di samping kepentingan-kepentingan negara. Walaupun tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

Penjatuan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan peneakan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penjatuan pidana.

Menurut Menurut Erna Dewi²⁰ hukum yang berkualitas pada dasarnya merupakan praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, di samping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Dengan adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Firza Andriansyah, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kamis 19 November 2015

²⁰ Hasil wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Sabtu 21 dan 23 November 2015.

tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu diam-diam terkandung pengertian supremasi hukum.

Peranan hakim dalam menegakkan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menurut Firza Andriansyah²¹ Hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapinya melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta

²¹ Hasil Wawancara dengan Firza Andriansyah, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kamis 19 November 2015

yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan

Penjelasan di atas sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, menurut penulis hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi kepentingan korban atas keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.²²

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta faktor normatif sebagai dasar hukum penjatuhan pidana bersyarat, yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana, harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya. Pokok pikiran penjatuhan pidana bersyarat ; yakni, "Putusan pidana penjara yang dijatuhkan paling lama satu tahun, dan hakim berkeyakinan pidana bersyarat akan dilaksanakan melalui pengawasan, sehingga terpenuhi syarat umum maupun khusus. Hakim memandang pemidanaan terhadap pelaku dapat dilakukan di luar penjara, berdasarkan sifat, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku, dan masyarakat dimana pelaku berada. Sifat dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, baik bobot maupun sikap pelaku setelah melakukan pidana." Tujuan pemidanaan integratif dikaitkan dengan penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi menunjukkan; (1) Syarat umum yang bertujuan terpidana korupsi tidak mengulangi perbuatannya dan melanggar masa percobaan. (2) Tidak memasukkan terpidana korupsi ke dalam penjara, merupakan pengakuan adanya akibat negatif pelaksanaan pidana penjara, yang memungkinkan terpidana menjadi lebih jahat, dan merupakan upaya melindungi masyarakat dari tindak pidana yang lebih jahat. (3) Upaya penyelesaian secara internal terhadap tindak pidana korupsi sebagai akibat dari kurang tertib dan pengawasan internal, menunjukkan rasa solidaritas para anggota masyarakat atau instansi yang bersangkutan, meskipun upaya demikian tidak sepenuhnya dapat dibenarkan dari pandangan penegakkan hukum. (4) Pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi, merupakan pengimbalan atas suatu kejahatan, tetapi tidak lagi mengikuti pengertian pengimbalan yang mendasarkan pada pembalasan yang disyahkan, tetapi

²² Rahardjo, Satjipto. *Op. Cit.*, p. 33.

pengimbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang seimbang dengan tindak pidana korupsi, yang dilakukan bobot kasus maupun pelakunya, sebagaimana prinsip proporsionalitas dan ide individualisasi pidana.

Hakim dalam putusannya dibenarkan menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi. Terbukanya kemungkinan penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi, akibat putusan hakim yang menyimpang dari ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, sejauh putusan demikian dapat dibenarkan. Hakim beralasan, penyimpangan putusan disebabkan ancaman pidana penjara minimum khusus membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, dan tidak jelasnya ukuran yang digunakan dalam menentukan lamanya ancaman pidana penjara minimum khusus sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Secara teoritis penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi juga dapat dibenarkan, berdasar : (1) pidana tidak semata-mata dimaksudkan memberikan nestapa kepada pelaku; (2) pidana harus setara dengan kesalahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud prinsip proporsionalitas; (3) pemidanaan harus bersifat humanis, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang beradab, mampu menciptakan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dalam pergaulan hidup masyarakat; (4) perlunya penerapan ide individualisasi pidana, bahwa pidana disesuaikan keperluan pembinaan terpidana, dan (5) tujuan pemidanaan bersifat integratif, mampu menghilangkan noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan mampu mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik.

Pidana bersyarat sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana semata-mata, namun lebih jauh adalah pada masyarakat secara luas karena kepentingan itu meliputi pengurangan-pengurangan biaya yang dikeluarkan masyarakat, mengurangi biaya perampasan kemerdekaan. Pidana bersyarat, melandasi sanksi pidana sederhana, karena secara sederhana tujuannya adalah untuk menjaga atau menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan cara lebih mengarahkan terpidana agar belajar hidup lebih produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikannya dan lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pidana bersyarat bagi orang dewasa menurut hukum pidana. Pidana bersyarat mendapat kemungkinan pada pidana penjara paling tinggi satu tahun., dalam penahanan dan dalam hal denda dengan uang. Ini adalah pidana di mana terpidana tidak menjalani pidananya, apabila terpidana sanggup memenuhi syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya. Hakim menanggukkan keputusannya dengan bersyarat dan baru menjatuhkan pidana yang sebenarnya apabila ternyata, bahwa terpidana yang diuji itu, tidak bertindak sesuai dengan syarat yang ditentukan terhadapnya (sistem-percobaan). Hakim menjatuhkan pidana dengan segera, akan tetapi sekaligus

menetapkan, bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali apabila hakim memutuskan lain, berdasarkan kenyataan, bahwa terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya selama waktu percobaan.

Menurut pendapat penulis, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kerugian bagi korban belum memenuhi unsur keadilan, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan kerugian dan penderitaan fisik yang dialami korban, tidak memberikan efek jera dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Hal ini sesuai dengan teori keadilan legal yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.²³

Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban Septi Handayani Binti Iskandar Hamid sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 1714/46/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten tanggamus yang diperiksa oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil pemeriksaan tubuh, terdapat memar di kelopak mata kanan atas dan pipi kanan atas dengan Diameter \pm 5 Cm dan luka memar dan lecet dileher bagian depan dengan diameter \pm 5 Cm x 7 Cm. Hasil Visum et Repertum ini menyimpulkan bahwa luka memar dan lecet tersebut akibat benturan benda tumpul.

Penjatuhan pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, sebagaimana diputuskan hakim tersebut relatif kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa. Selain itu penganiayaan ini dilakukan terdakwa dihadapan anak korban yang masih kecil, bahkan perbuatan terdakwa berupa mendorong dan mencekik korban dilakukan ketika korban sedang menggendong anaknya yang menangis.

Putusan Pengadilan Nomor: 55/Pid/2015/PT.TJK, adalah hakim mengabaikan aspek kerugian dan penderitaan fisik yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana penganiayaan. Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim juga tidak memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak dapat

²³ Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, p. 105-106.

dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut. Seharusnya terdakwa dipidana penjara (kurungan badan) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Seharusnya hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrument untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Keadilan hakim dalam proses peradilan semestinya tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Keadilan dalam konteks ini adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim semestinya memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang

sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

C. Penutup

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah pertimbangan yuridis sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP, hakim menilai bahwa terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Selain itu hakim juga melihat peristiwa yang melatar belakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan oleh korban yang tidak beritikad baik kepada terdakwa sebagai penjamin hutang piutang di Pegadaian dan terdakwa telah menolong korban untuk mendapatkan pinjaman, tetapi korban tidak bersedia menyerahkan surat dan jaminan kepada terdakwa, sehingga tidak adil kalau terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan. Pemidanaan tidak hanya untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi agar terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, sehingga dengan sadar tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa telah mengakui kesalahannya dan memiliki latar belakang kelakuan yang baik dalam hidup bermasyarakat.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dipandang belum sesuai dengan keadilan masyarakat karena hakim kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa. Hakim semestinya menjatuhkan pidana yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban berupa luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara.
- _____. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Wildiada, Gunakarya. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 55/Pid/2015/PT.TJK.